

BAB I

PEDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk persoalan yang telah lama berkembang dalam masyarakat yang mengakibatkan dampak besar terhadap perilaku kehidupan dan menjadi perhatian umum yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu suatu bentuk permasalahan dalam bidang sosial yang menjadikan permasalahan tidak dapat menemukan solusi secara cepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan benar-benar bukanlah suatu permasalahan yang mudah namun dapat dikategorisasikan ke dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi, (Kwong, Yan Wai dikutip dari Sutikno, dkk (2023).

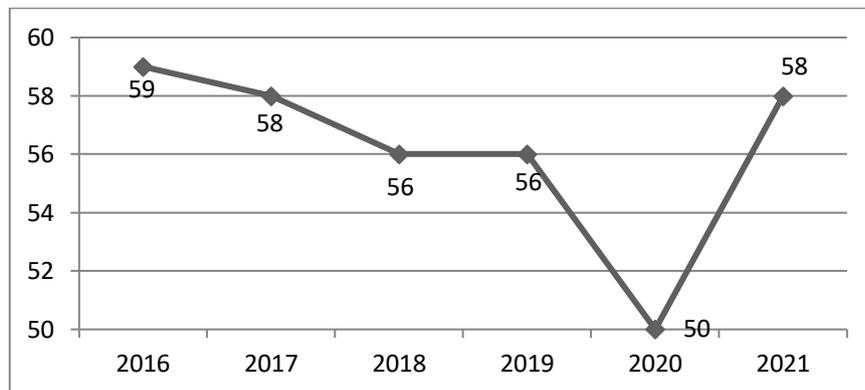
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, pendapatan, pendidikan, lokasi, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan di Indonesia dicirikan oleh banyaknya rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan. Akibatnya, meski tidak tergolong miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan

miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk, (Yuhana & Kartini, 2019).

Harapan bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan upaya yang nyata dalam penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah telah membuat sebuah program untuk mengatasi hal tersebut. Program dari pemerintah yang telah dijalankan terkait penanggulangan kemiskinan yaitu satu-satunya program bantuan bersyarat yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan, kebijakan program keluarga harapan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah awal mulanya pada tahun 2007. Program keluarga harapan diakses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak. Akses ke fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan disekitar mereka. Manfaat dari PKH juga bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia dalam menjaga kesejahteraan sosial, (Mellani, 2022).

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2008 Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Penyaluran bantuan PKH sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, (Mellani, 2022). Dengan rendahnya pendidikan,

mereka tidak dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga tidak dapat lepas dari rantai kemiskinan yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2016-2021 berfluktuasi. Berikut data jumlah penduduk miskin di Kabupaten TTU dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:



Grafik 1.1. Jumlah Penduduk miskin Kabupaten TTU, 2016-2021

Sumber: BPS Kabupaten TTU, 2022

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten TTU mengalami fluktuasi selama periode pengamatan terhitung sejak tahun 2016 sampai 2021. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah 59,340 dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 mencapai 50,720, akan tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2021 dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 58,330. Pada tahun 2020 terjadinya pandemi covid-19, oleh karena itu semua masyarakat dirumahkan atau tidak bekerja sehingga banyak yang menganggur dan tidak berpenghasilan.

Sebagian besar sebaran angka kemiskinan ada di desa, dan selebihnya berada di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, prioritas pembangunan diarahkan ke desa. Selain memang kuantitas angka kemiskinan dan keluarga pra

sejahtera masih sangat tinggi, juga karena di desa kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap dengan maksimal. Dengan begitu, pengangguran yang memicu angka kemiskinan dapat ditekan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, serta mengentaskan dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera, (Kartiawati, 2017).

Desa Nunmafo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Insana dan merupakan salah satu desa yang telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Desa Nunmafo juga merupakan desa yang tergolong miskin dan masih banyak sumber daya alam yang belum tergarap secara maksimal. Berikut data jumlah penduduk miskin dan jumlah penerima PKH di Desa Nunmafo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penerima PKH di Desa Nunmafo
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Penerima PKH (KK)
2018	1.899	503	440	75
2019	1.944	514	461	75
2020	2.124	593	505	133
2021	2.117	589	504	153
2022	2.110	568	502	161

Sumber: Kantor Desa Nunmafo Kecamatan Insana, 2023

Dari tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di desa Nunmafo pada tahun 2018 sebanyak 1.899 jiwa dan yang tergolong dalam jumlah penduduk miskin berjumlah 503 jiwa. Sedangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya sebanyak 75 KK, belum merata bahkan belum setengah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pada tahun 2019-2020 terjadi

peningkatan jumlah penduduk menjadi 1.944 jiwa hingga 2.124 jiwa dan jumlah penduduk miskinnya pun ikut bertambah 514 jiwa-593 jiwa. Tetapi jumlah penerima PKH di tahun 2019 tidak mengalami perubahan sama sekali yaitu 75 KK dan terjadi penambahan KPM di tahun 2020 menjadi 133 KK. Sedangkan pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan pada jumlah penduduk yaitu 2.117 jiwa-2.110 jiwa serta jumlah penduduk miskin menjadi 589 jiwa-568 jiwa dan terjadi penambahan untuk penerima PKH di tahun 2021 menjadi 153 KK dan 161 KK di tahun 2022. Penambahan ini sejalan dengan data yang tercatat di Kementerian Sosial, dianggap kurang beruntung (Heerlyn, dikutip dari Majid & Dewi 2022). Walaupun terjadi penambahan penerima PKH tetapi belum signifikan. Hal ini diduga disebabkan sistem verifikasi dan validasi data yang tidak akurat baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Sebagaimana hasil penelitian Dewi (2002) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batopora Kota Baubau menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batopora Kota Baubau masih banyak mengalami kendala dalam aspek komunikasi, informasi yang disampaikan belum maksimal dikarenakan kurangnya akses saat memberikan informasi mengenai PKH salah satunya yaitu informasi mengenai jadwal penerimaan bantuan atau informasi pengurangan anggota dan penambahan anggota peserta penerima dan penyaluran bantuan. Pada aspek sumber daya para petugas yang menjalankan tugas belum mencapai sasaran yang diharapkan, karena belum maksimal dalam pendataan seperti masih ada keluarga yang kurang mampu tetapi tidak terdaftar dalam program PKH karena tidak adanya perombakan data

dan masih menggunakan data base lama, tidak adanya kunjungan dari pelaksana PKH pada peserta penerima. Pada aspek finansial, uang bantuan masih kerap digunakan diluar dari ketentuan program PKH. Tidak adanya pendampingan saat mengambil bantuan, para peserta penerima mengambil bantunnya sendiri. Tidak hanya itu masih banyak anggota peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan karena tidak adanya bimbingan dalam menggunakan kartu PKH. Pada aspek disposisi pelaksana PKH atau pendamping masih kurang berinteraksi dengan peserta penerima bantuan.

Selain itu, temuan Mellani (2022) menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Selayan Raya masih belum terlaksana dengan baik, terutama untuk indikator tujuan program, ketepatan sasaran, kejelasan teknis, kondisi ekonomi dan geografis, kompetensi pelaksanaan dan komunikasi pelaksanaan. Pemerintah perlu lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai PKH kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar pemerintah.

Desa Nunmafo merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Insana yang telah menerima program dana PKH yang terdiri dari tiga dusun. Bantuan ini tersebar di setiap dusun. Adapun RTSM yang menerima bantuan PKH di setiap dusun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Tiga Dusun, Desa
Nunmafo Tahun 2018-2022

Tahun	Dusun 1 (KK)	Dusun 2 (KK)	Dusun 3 (KK)	Jumlah Penerima PKH (KK)
2019	35	20	20	75
2020	65	38	30	133
2021	65	49	39	153
2022	68	52	41	161
2023	65	47	42	154

Sumber: Kantor Desa Nunmafo Kecamatan Insana, 2023

Masyarakat yang menerima dana program keluarga harapan di desa Nunmafo pada tahun 2019 sampai 2023 mencapai 154 KPM yang didampingi oleh 5 (lima) orang pendamping. Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima danabantuan yang didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikandan kesehatan, karena kebanyakan KPM memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Pedoman Pelaksanaan PKH 2020).

Program Keluarga Harapan merupakan program yang ditujukan untuk mengatasi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)pada keluarga berpendapatan rendah.Program ini mewajibkan penerima manfaat untuk mengakses layanan antenatal setidaknya empat kali selama masa kehamilan.Melalui pelayanan antenatal, ibu dapat memperoleh banyak informasi mengenai kehamilan sehingga berat badan lahir rendah dapat dicegah. Berikut daftar berat badan balita penerima

PKH yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Berat Badan Bayi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Nunmafo Tahun 2019-2023

Tahun	Bayi (Gram) Yang Memenuhi Syarat (2,7-4.0)	BB Bayi (Gram) Yang Tidak Memenuhi Syarat (2,5-2,6)	Jumlah Bayi
2019	12	12	24
2020	20	12	32
2021	32	10	42
2022	45	3	48
2023	21	3	24

Sumber: Pendamping PKH desa Nunmafo, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019-2022 pada bayi balita yang memenuhi syarat yaitu 12 hingga bayi 45 bayi dan terjadi penurunan pada bayi yang tidak memenuhi persyaratan yaitu 12 bayi menjadi 3 bayi saja. Di tahun 2023 jumlah bayi penerima PKH ada 24 bayi dimana bayi yang memenuhi syarat ada 21 bayi dan yang tidak memenuhi syarat ada 3 bayi.

Komponen berikut yaitu komponen pendidikan yakni RTSM yang memiliki anak bersekolah ditingkat SD, SMP, dan SMA. Berikut data pendidikan di desa Nunmafo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Data Peserta Didik yang Menerima PKH di Desa Nunmafo Tahun 2019-
2023

Tahun	SD	SMP	SMA
2019	55	44	30
2020	73	59	35
2021	85	63	40
2022	96	70	71
2023	65	54	53

Sumber: Pendamping PKH Desa Nunmafo 2023

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 peserta didik yang menerima program bantuan PKH memiliki jumlah sebanyak 55 siswa dan terjadi perubahan di tahun berikutnya hingga tahun 2022 penambahan lagi peserta didik baru dimana tingkat SD berjumlah 96 siswa, tingkat SMP 70 siswa dan tingkat SMA berjumlah 71 siswa. Pada tahun 2023 jumlah siswa SD, SMP dan SMA yang menerima PKH menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang putus sekolah dan juga siswa tersebut absen selama 3 bulan berturut-turut maka siswa tersebut tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Selain data berat badan balita dan pendidikan, masih ada data jumlah ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas yang menerima program bantuan PKH. Berikut data jumlah ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Ibu Hamil, Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat di Desa
Nunmafo Tahun 2019-2023

Tahun	Ibu Hamil	Lansia	Penyandang Disabilitas
2019	6	20	2
2020	4	32	2
2021	7	38	3
2022	4	49	4
2023	3	74	3

Sumber: Pendamping PKH Desa Nunmafo, 2023

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, dilihat bahwa jumlah ibu hamil pada tahun 2019 ada 6 orang dan menurun di tahun 2020 menjadi 4 orang. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 7 orang dan pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan menjadi 3 orang. Sedangkan untuk lansia di tahun 2019 jumlahnya ada 20 orang dan terjadi penambahan di tahun-tahun berikut hingga tahun 2023 74 orang. Sementara untuk penyandang disabilitas, mulai dari tahun 2019 dan tahun 2020 pesertanya tetap 2 orang saja dan terjadi penambahan peserta di tahun 2021 dan 2022 menjadi 4 orang. Di tahun 2023 penyandang disabilitas berat menurun kembali menjadi 3 orang. Dari data penerima bantuan PKH, dalam 1 anggota KPM terdapat 3 hingga 4 anak yang bersekolah dan ada juga yang memiliki balita ada juga anggota KPM yang memiliki anggota keluarga disabilitas berat dan lansia.

Program PKH di Desa Nunmafo Kecamatan Insana dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban, semuanya sudah berjalan dengan lancar, dimana setiap komponen semuanya menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi

masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti kebanyakan KPM mempergunakan bantuan dari program ini untuk keperluan lain, seperti belanja pakaian dan hal-hal lainnya yang sejatinya kesehatan dan pendidikan lebih utama dari hal tersebut. Padahal tujuan PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu diperlukan kontribusi pendamping KPM untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Status Sosial Kelompok Sasaran di Desa Nunmafo”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut bagaimana Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kelompok Sasaran Kesehatan ibu hamil dan bayi, pendidikan anak, disabilitas berat dan lansia di desa Nunmafo Kecamatan Insana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kelompok sasaran kesehatan ibu hamil dan bayi, pendidikan anak, disabilitas berat dan lansia di desa Nunmafo Kecamatan Insana.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan antara lain ;

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Dunia Akademik

Bagi Universitas selaku lembaga pendidikan semoga dapat dijadikan tambahan informasi dan sebagai masukan atau referensi bagi peneliti berikutnya dibidang penelitian sejenisnya.

b. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar nantinya dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan hal yang terjadi dalam dunia nyata, serta memberikan pengalaman nyata dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan penulis pada penelitian yang ada.

c. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan aplikasi ilmu Ekonomi Pembangunan yang diperoleh dibangku kuliah dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi serta bahan kajian tentang Program Keluarga Harapan.

b. Sebagai bahan refresi bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.